

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PERKARA BAIQ NURIL DALAM
PENYEBARAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERMUATAN ASUSILA.**

(Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 574K/Pid.sus/2018)

Clementia Rafiella Boiwas Tharob¹, Dr. H. Irmanjaya Taher, S.H., M.H²,

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

²Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

¹ rafiellaokasha@gmail.com

² irmanjtaher@gmail.com

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi serta informasi dan komunikasi banyak memberikan perubahan dan fenomena dalam masyarakat. Selain memberi banyak kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, di lain sisi pun teknologi informasi juga dapat menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana yang mengatur dalam cyberspace. Salah satu bentuk cybercrime yang terjadi di dalam masyarakat adalah kejahatan kesusilaan dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kehadiran UU ITE belum menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi cybercrime dikarenakan terdapatnya pasal karet dalam UU ITE sehingga terkadang menjerat banyak korban dari pasal tersebut. Salah satunya ialah Baiq Nuril seorang Guru honorer di SMAN 7 Mataram yang terjerat Pasal 27 ayat (1) UU ITE atas Penyebaran Dokumen Elektronik Bermuatan Asusila. Dalam kasus ini putusan hakim dalam Putusan No.574K/PID.SUS/2018 belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga belum menemui keadilan sebagaimana yang menjadi tujuan hukum. Hakim dinilai kurang tepat dalam membuat putusan yang berlaku adil bagi Baiq Nuril maupun bagi pihak lain yang ikut berperkara dalam kasus Penyebaran Dokumen Elektronik Bermuatan Asusila.

Kata Kunci: UU Informasi & Transaksi Elektronik, *Cybercrime*, Kesusilaan, Keadilan.

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ARTICLE 27 PARAGRAPH (1) OF THE LAW ON ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS ON THE BAIQ NURIL CASE IN THE DISTRIBUTION OF ELECTRONIC DOCUMENTS CONTAINED WITH ASUSILA.

(Case Study of Supreme Court Decision No. 574K/Pid.sus/2018)

ABSTRACT

Clementia Rafiella Boiwas Tharob¹, Irmanjaya Taher²,

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

²Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

¹ rafiellaokasha@gmail.com

² irmanjtaher@gmail.com

The rapid development of technology as well as information and communication provides many changes and phenomena in society. In addition to making many contributions to improving the welfare and progress of human civilization, on the other hand, information technology can also be an effective means to commit acts against the law. The development of science and technology has an impact on the development of law, including criminal law that regulates cyberspace. One form of cybercrime that occurs in society is a crime of decency in the field of Information and Electronic Transactions, the government issued Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The presence of the ITE Law has not been the right solution to overcome cybercrime because there is a rubber article in the ITE Law so that sometimes it ensnares many victims of the article. One of them is Baiq Nuril, an honorary teacher at SMAN 7 Mataram who is ensnared in Article 27 paragraph (1) of the ITE Law on the Dissemination of Electronic Documents with Immoral Content. In this case the judge's decision in Decision No. 574K/PID.SUS/2018 has not been in accordance with the provisions of the legislation in force in Indonesia, so it has not met justice as the purpose of the law. The judge was deemed inappropriate in making a decision that was fair to Baiq Nuril as well as to other parties involved in the litigation in the case of Disseminating Electronic Documents with Immoral Content.

Keywords: *Information & Electronic Transaction Law, CyberCrime, Morality, Justice.*